

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
PELAPORAN SPT PPH PASAL 25 TAHUN 2010-2012 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun Oleh:
Noor Ratri Sekar Langit
10409134017

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
PELAPORAN SPT PPH PASAL 25 TAHUN 2010-2012 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 4 Juli 2013


Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta


Disetujui

Ketua Program Studi
Akuntansi Diploma III


Ani Widayati M.Pd

NIP. 19730908 200112 2 001

Dosen Pembimbing

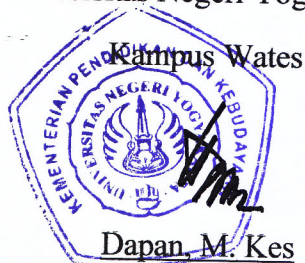

Amanita Novi Yushinta, SE

NIP. 197708102006042002

Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta



NIP. 195710121985021001

TUGAS AKHIR

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN SPT PPH PASAL 25 TAHUN 2010-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Noor Ratri Sekar Langit

10409134017

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi D III

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

Pada tanggal... 11 Juli 2013 dan dinyatakan telah memenuhi
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua merangkap anggota

Ani Widayati M.Pd

Sekretaris merangkap anggota

Amanita Novi Yushinta, SE

Yogyakarta, 23 Juli 2013

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Dekan,

Ketua Pengelola,


Dr. Sugiharsono, M.Si.


Dapan, M. Kes.

NIP. 19550328 198303 1 002

NIP. 19571012 198502 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Noor Ratri Sekar Langit

NIM : 10409134017

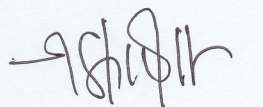
Program studi : Akuntansi D III

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25 Tahun 2010-
2012 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Yogyakarta

Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil pekerjaan sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak mengandung materi yang dipublikasikan orang lain sebagai persyaratan penyelesaian studi pada universitas lain kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 4 Juli2013

Yang Menyatakan



(Noor Ratri Sekar Langit)

MOTTO

1. Melakukan yang terbaik – untuk yang terbaik dan menjadi yang terbaik.
2. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QSS. Az Zumar:10)
3. Tidak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma, semua dibutuhkan usaha dan do'a.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak dan ibuku yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan segala fasilitas demi keberhasilanku meraih mimpi.
2. Buat kakak-kakakku, terimakasih atas segala bantuannya baik moril dan materiil maupun doa restumu.
3. Sahabat-sahabatku, terimakasih atas segala bantuan, dorongan dan semangatnya.
4. Almamater dan kampusku tercinta.

ABSTRAK

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN SPT PPh PASAL 25 TAHUN 2010-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Oleh

Noor Ratri Sekar Langit

NIM: 10409134017

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 tahun 2010 sampai dengan 2012, (2) Mengetahui faktor-faktor, upaya, hambatan, dan cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Metode penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25 tahun 2010-2012 dan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Prosedur Pelaporan SPT PPh Pasal 25 Badan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, (2) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25 yaitu tahun 2010=66,5% dengan kriteria cukup, 2011=62,5% dengan kriteria kurang, 2012=56,7% dengan kriteria kurang (3) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 dipengaruhi oleh faktor kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta dan adanya sanksi pidana atau denda administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT, (4) Pengawasan kepada WP adalah upaya yang dilakukan KPP Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT PPh Pasal 25, (5) Sulitnya pengawasan merupakan kendala bagi KPP Pratama Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25, (6) Memaksimalkan pengawasan dan peningkatan akses adalah cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kepatuhan WP dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahamat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar, dengan judul “Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas PendapatanPengelolaanKeuangandanAset Daerah ”. Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Selama dalam proses penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi .
3. Dapan, M. Kes., Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
4. Ani Widayati, M.Pd., Ketua Program Studi Akuntansi D III
5. Amanita Novi Yushinta, SE., Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yang telah menyisihkan waktu untuk membimbing penulis.

6. Iwang Kurniawan telah membantu melancarkan kegiatan survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
7. Semua pihak yang telah banyak sekali membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, Karena penulis menyadari penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Sebagai akhir kata semoga penulisan Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 2013
Penulis

Noor Ratri Sekar Langit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Tugas Akhir	6
F. Manfaat Tugas Akhir	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
a. Fungsi Pajak	10
b. Sistem Pemungutan Pajak	11
c. Definisi Wajib Pajak	11
d. Definisi Pajak Penghasilan.....	12
e. Pajak Penghasilan Badan Pasal 25	13
f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri	13

2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
c. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	15
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25	17
a. Pengertian SPT.....	17
b. Fungsi SPT	17
c. Batas Waktu	18
d. Prosedur Penyelesaian SPT.....	19
e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	20
B. Kerangka Berpikir.....	21
C. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian.....	22
B. Metode Pengumpulan Data	23
C. Sumber Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Data Umum	26
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.....	26
2. Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta	29
3. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta	29
4. Visi dalam Misi KPP Pratama Yogyakarta.....	34
5. Struktur Organisasi KPP Prata Yogyakarta	36
6. Pembagian Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	37
B. Data Khusus	43
C. Pembahasan	46

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 dari Tahun 2010-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	46
2. Hambatan yang di hadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25	49
3. Upaya-upaya yang di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah wajib pajak badan dan jumlah SPT Tahunan masuk pasal 25 Tahun 2010-2012.....	43
Tabel 2. Presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2010-2012	44
Tabel 3. Skala Lima Normal Absolut	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi dapat dibuktikan dengan adanya pengangguran dan kemiskinan, maka bangsa Indonesia saat ini berusaha untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun sepiritual berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Persatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu kemampuan nasional untuk segera keluar dari keterpurukan itu dan bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah dulu maju. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan pendanaan yang cukup besar sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Pendanaan yang besar itu bersumber pada utang luar negeri, sektor migas dan pajak. Oleh karena terbatasnya sediaan migas yang dimiliki Indonesia dan naik turunnya harga migas di pasaran dunia, serta tingkat suku bunga utang luar negeri yang tinggi, keduanya tidak dapat diandalkan lagi sehingga sektor pajaklah yang sekarang menjadi prioritas utama dalam penerimaan negara.

Sektor pajak harus terus ditingkatkan karena sektor pajak merupakan satu-satunya penerimaan negara yang bisa mendukung suksesnya pembangunan

nasional. Peningkatan penerimaan pajak diutamakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, serta dapat juga diperoleh dari *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak agar prinsip kemandirian dapat dilaksanakan.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan no. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Pada tahun 1983 Pemerintah melakukan informasi perpajakan dengan mengubah *Official Assessment* dengan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Penerimaan pajak saat ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan oleh Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban pajaknya, banyak pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya badan usaha yang telah berdiri dan telah melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Yogyakarta.

Permasalahan lain yang timbul adalah masih banyak kekeliruan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Kekeliruan tersebut seperti Wajib Pajak kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh Kurang Bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Mengingat betapa pentingnya kepatuhan Wajib Pajak (Badan) PPh Pasal 25 dalam pelaporan SPT maka timbul permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang setiap tahun semakin menurun. Kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan cara membayar pajak dengan benar, membuat Wajib Pajak merasa kurang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, yang mengakibatkan

masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar maksimal diperlukan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul “EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN SPT PPh PASAL 25 TAHUN 2010-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA”

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih sangat kurang dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 dari tahun 2010-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Banyak pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan Pajak tidak maksimal.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan cara membayar Pajak dengan benar.
4. Banyak kekeliruan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan PPh atau PPh kurang bayar yang mengakibatkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target.

5. Keterbatasan akses tentang kebenaran SPT yang di sampaikan merupakan salah satu hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan dijadikan kajian utama dalam penulisan ini adalah

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih sangat kurang dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 dari tahun 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Hambatan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 tahun 2010-2012.
3. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT tahunan PPh Pasal 25 di kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tahun 2010-2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib pajak (Badan) dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 dari tahun 2010-2012 pada kantor Pelayanan Pajak Pratama?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam pelaporan SPT PPh pasal 25 tahun 2010-2012?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 tahun 2010-2012?

E. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak (badan) dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 dari tahun 2010-2012 pada kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 Tahun 2010-2012.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam pelaporan SPT PPh pasal 25 Tahun 2010-2012.

F. Manfaat Tugas Akhir

Tugas akhir ini diharapkan mempunyai manfaat dari berbagai aspek yaitu:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah ke dalam praktik yang

sesungguhnya dalam suatu instansi/perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.

2. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam penyampaian SPT PPh Pasal 25 pada tahun-tahun berikutnya.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pajak

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu meski pada saat itu belum dinamakan pajak namun masih berupa pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan oleh negara. Jadi dengan kata lain, pajak yang semula berupa pemberian berubah menjadi pungutan. Hal ini wajar karena kebutuhan negara yaitu mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik itu di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun sepiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa

pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 1) menyatakan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mr. Dr. N.J. Fieldman sebagaimana yang dikutip oleh Siti Resmi (2012: 10) menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dasar terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang tidak berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

a. Fungsi Pajak

Sebagai mana diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini tercermin dalam asas ekonomi yang menghendaki pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sebagai contoh, diimasukannya pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu di luar bidang keuangan atau anggaran. Contoh :

- a) Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga produksi dan konsumsi minuman keras dapat ditekan.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut

1) Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan

Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

"Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap."

d. Definisi Pajak Penghasilan

Soebakir, dkk (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

e. Pajak Penghasilan Badan Pasal 25

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009 : 204) adalah: "Angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan." Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan: Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 adalah Angsuran Pajak Penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan.

f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25 %.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*,

di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara efektif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

c. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25

a. Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2011: 29) adalah :

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011*

tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT

Tahunan adalah :

“Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.”

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT

Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang,

objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban

menurut peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2011 : 29), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi

Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak

yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan Kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

c. Batas Waktu

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2011: 36) diatur sebagai berikut

SPT Tahunan

- 1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya.
- 2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

d. Prosedur Penyelesaian SPT

- 1) SPT dicetak oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lalu disalurkan ke seluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian disampaikan kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
- 2) Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT dengan mengambil sendiri blanko SPT ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk diisi dengan lengkap, benar dan jelas.
- 3) Setelah diisi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT tersebut dikembalikan lagi ke kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalah fahaman mengenai pembayaran pajak.
- 4) Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT diserahkan ke bagian Pengelola Data dan Informasi (PDI) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan, misalnya Kurang Bayar (KB), Lebih Bayar (LB) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT diserahkan ke bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) I sampai IV atau menurut wilayah tempat Wajib Pajak tinggal.
- 5) Bagian Pengawasan dan Konsultasi (waskon) akan memeriksa kesalahan tersebut, apabila setelah diperiksa terjadi Kurang Bayar (KB), maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan himbauan dan diberikan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dan wajib

Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, apabila Lebih Bayar (LB) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi.

- 6) Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT diarsipkan oleh KPP sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.

e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Kerangka Berpikir

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya

angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Selain itu memberikan informasi kepada masyarakat maupun Wajib Pajak mengenai kemudahan pelaporan pajak.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 dari Tahun 2010-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

(Sukmadinata, 2006:72)

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Mei 2013

3. Data yang Dibutuhkan

a. Data Umum

Data umum adalah data yang tidak berkaitan langsung didalam pembahasan masalah. Data umum yang dibutuhkan dalam Tugas Akhir ini yaitu Profil perusahaan, struktur organisasi

b. Data Khusus

Data khusus data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam data khusus yang dibutuhkan adalah kepatuhan, hambatan dan upaya Wajib Pajak dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 Tahun 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Metode ini dengan cara memperhatikan dan mengamati dokumen atau catatan terdahulu dengan dokumen atau catatan yang telah diperbaharui yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Hasil dari metode ini adalah data untuk kepatuhan pelaporan SPT PPh Badan Pasal 25 Tahun 2010-2012.

2. Interview/Wawancara

Metode ini dengan cara wawancara secara langsung dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu pada seksi PPh Badan dan seksi TUP mengenai hambatan dan upaya wajib pajak dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 Badan tahun 2010-2012.

Data yang diteliti adalah hambatan dan upaya wajib pajak dalam pelaporan SPT PPh Pasal 25 Badan tahun 2010-2012.

C. Sumber Data

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis memerlukan data-data yang terbagi atas berbagai macam, meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara berupa opini, subyek atau orang sejarah individu atau kelompok yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 99.147).

2. Data Sekunder.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh oleh pihak lain. (Indiantoro dan Supomo, 99.147).

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan suatu metode untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan

deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah atau angka-angka yang akan diteliti yaitu mengenai jumlah Wajib Pajak Badan dan jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak Badan. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama inspektien yan financien yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. mulai saat itu kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960. Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKPA Yogyakarta. Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sedangkan *launching* kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta satu beralamat di Jl. P. Senopati No. 20, Yogyakarta. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Kantor Pelayanan Pajak Pratam Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Ditjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf.

2. Wilayah Kerja KPP Pratama Yogyakarta

Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak Dr. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995. Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta, tingkat kepadatan penduduk sekitar 13.634 jiwa per km², yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT. Penyumbang PDRB terbesar adalah dari lapangan usaha. Sedangkan sektor usaha yang potensial di KPP Pratama Yogyakarta terutama sektor perantara keuangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, real estate, transportasi pergudangan komunikasi, dan konstruksi.

3. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok, Dan Fungsi KPP Pratama Yogyakarta

a. Kedudukan KPP Pratama Yogyakarta

Kantor pelayanan pajak pratama yang selanjutnya dalam keputusan menteri keuangan disebut KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan

tanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yaitu Bapak Aridel Mindra. KPP Pratama Senopati mendirikan bangunan yang sangat strategis, karena berada di pusat kota. Tepatnya di jalan Jl. Panembahan Senopati No.20 Yogyakarta. Terdapat tiga lantai dengan pemanfaatannya sebagai berikut:

- 1) Lantai 1 di tempati oleh seksi pelayanan
- 2) Lantai 2 di tempati oleh subag umum, seksi PDI, seksi ekstensivikasi ruangan kepala kantor, dan ruang rapat.
- 3) Lantai 3 ditempati oleh seksi waskon I – IV, seksi penagihan, seksi pemeriksaan, ruang fungsional pemeriksaan, ruang rapat, ruang konsultasi.

b. Potensi pajak di KPP Pratama Senopati

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Yogyakarta saat ini memang telah mengalami peningkatan. Mulai dari perusahaan perseorangan hingga perusahaan berbadan hukum yang sudah besar. Pembayaran pajak yang dibayarkan langsung ke KPP Pratama Yogyakarta yang beralamat di Jl. Senopati mulai ramai pada pertengahan bulan. Namun tidak sedikit pula perusahaan terutama perusahaan kecil yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak.

Seperti yang telah dialami suatu perusahaan kecil berbentuk CV yang mengalami pergantian kepengurusan di tengah kota

Yogyakarta (daerah Juminahan), pada tahun 2008 mendapat masalah dengan pajak bulanan. Pada setiap bulan bagi perusahaan yang melakukan sewa gedung, wajib memotong PPH 10% dari pihak atau tempat yang disewa. Sedangkan pihak yang menyewakan gedung wajib memotong PPN 10%. Kewajiban pemotongan PPH belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hingga akhirnya CV tersebut wajib membayarkan PPH 10% dari pembayaran sewa selama 1 tahun yang seharusnya menjadi tanggungan pihak penyewa. Namun, karena ketidaktahuan CV tersebut pihak penyewa tidak mau membayarkan PPH tersebut karena telah berlalu selama 1 tahun.

Selain itu, setiap wajib pajak harus melakukan laporan bulanan pada setiap bulannya ke KPP Pratama Yogyakarta. Namun pelaksanaannya banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan mengenai laporan ini sehingga pihak pajak memberikan denda Rp100.000,00 kepada wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayarannya untuk satu kali keterlambatan. Perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan dengan pajak, akan dipanggil untuk membicarakan permasalahan pajak yang dialami. Dan pada akhirnya dicari penyelesaian mengenai permasalahan tersebut.

c. Fungsi dan Tugas KPP Pratama Yogyakarta

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

d. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

e. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam

rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

f. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

g. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar Wajib Pajak mengerti perpajakan. Dalam melakukan tugasnya KPP Yogyakarta menyelenggarakan fungsi dan tugasnya :

- 1) Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan .
- 2) Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.

- 3) Pengadministrasian dokumen, berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi pajak.
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- 7) Penata usaha piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

4. Visi dalam Misi KPP Pratama Yogyakarta

a. Visi KPP Pratama Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mempunyai visi sebagai berikut. “Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Visi yang pertama menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ingin menjadi instansi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien artinya KPP Pratama Yogyakarta melakukan pengukuran dan pertanggung jawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya masyarakat memiliki arti yaitu KPP Pratama Yogyakarta memastikan masyarakat yakin bahwa sistem

administrasi perpajakan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Modern, efektif, efisien dan dapat dipercaya masyarakat mengacu pada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia diangkat melalui kata integritas dan profesionalisme, sehingga sistem administrasi perpajakan yang dimaksud diatas dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki profesionalisme tinggi.

b. Misi KPP Pratama Yogyakarta

Dalam rangka pencapaian visi diperlukan misi. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah “Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

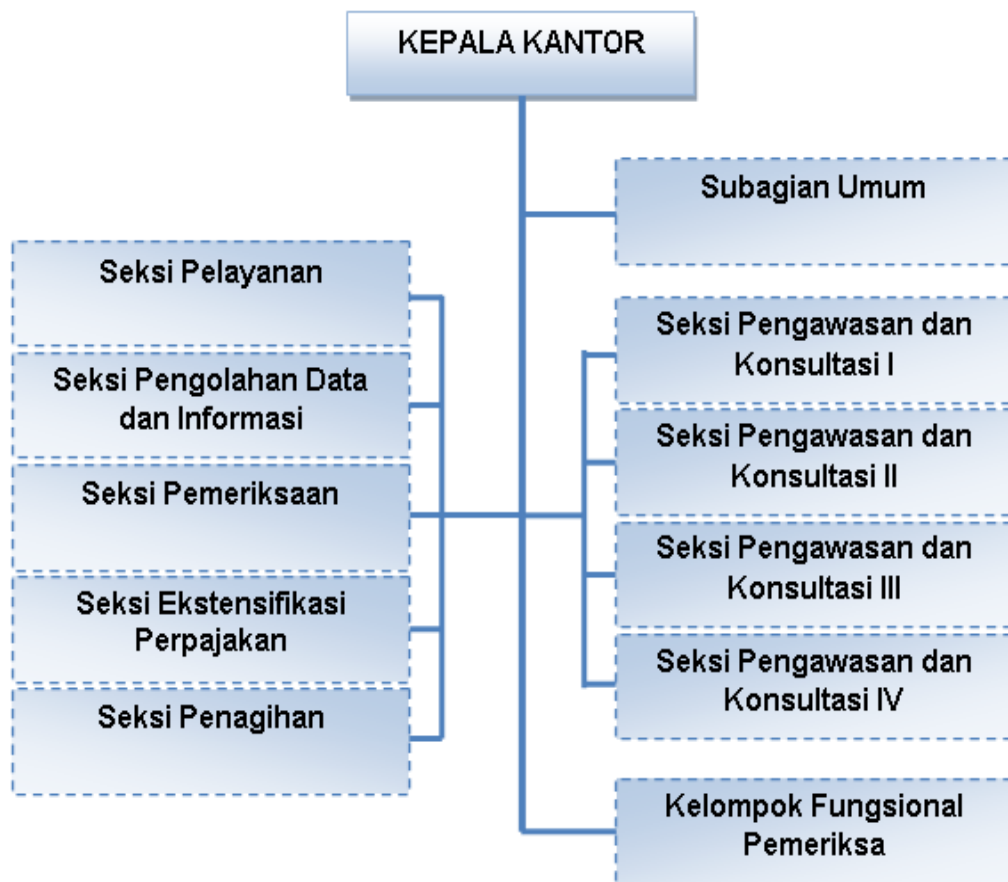
Misi tersebut menjelaskan bahwa Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah yang dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

Pajak Pratama Yogyakarta meliputi satu sub bagian umum, sembilan seksi (termasuk empat seksi Pengawasan Dan Konsultasi), Kelompok Fungsional, serta terdapat *Account Representative* (AR).

Berikut perinciannya :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
- b. Sub Bagian Umum
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Ekstensifikasi
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi
- h. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
- i. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I
- j. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi II
- k. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi III
- l. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi IV
- m. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak Dan Penilai PBB



Gambar 1.

Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

6. Pembagian Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Yogyakarta terdiri dari 10 seksi dan 1 kelompok fungsional. Adapun deskripsi jabatan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Pratama Yogyakarta

Dalam menjalankan tugasnya, kepala kantor mempunyai tugas antara lain:

- 1) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Yogyakarta.

b. Sub Bag Umum

Sub Bag Umum mempunyai tugas antara lain :

- 1) Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengkoordinasi penataan berkas arsip umum (non WP) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib dan aman serta memudahkan pencarian kembali.
- 4) Mengulkan diklat bagi pegawai, memproses ijin sekolah di luar kedinasan.
- 5) Memproses permohonan magang ataupun permohonan ijin permintaan data dari mahasiswa.

- 6) Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang tugas KPP.
- 7) Mengkoordinasikan penyelenggara administrasi DP3, LP2P, KP4 dan daftar riwayat hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Menyusun laporan/ daftar laporan Realisasi Anggaran Belanja, menyusun laporan SAKPA, melaksanakan penutupan buku kas umum.
- 9) Melaksanakan pengurusan Gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberhentian gaji dan TKPKN serta merencanakan membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
- 10) Menyusun usaha pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 11) Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan tugasnya seksi pelayanan mempunyai tugas antara lain :

- 1) Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan pencetakan NPWP beserta SKT.
- 2) Melayani wajib pajak dalam urusan cetak masal STTS dan STTP.
- 3) Melayani wajib pajak dalam hal validasi PBB
- 4) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT tahunan orang pribadi dan badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam SPT, mencetak LPAD, dan mengirim SPT luar KPP melalui pos.
- 5) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT masa.
- 6) Memberikan pelayanan VAT refund kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

d. Seksi Ekstentifikasi

- 1) Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak.
- 2) Melakukan urusan penambahan jumlah wajib pajak.
- 3) Melakukan administrasi atas permohonan mutasi dan bea SPPT PBB

e. Seksi Pemeriksaan

- 1) Mengkoordinasi pembuatan rencana pemeriksaan.
- 2) Mengkoordinasi pengusulan wajib pajak yang akan diperiksa.

- 3) Mengkoordinasi peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan dan seksi PDI.
- 4) Mengkoordinasi penerbitan Surat Perintah Pemeriksa, Pajak Surat Pemberitahuan Pemeriksa Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksa Pajak.
- 5) Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota perhitungan.
- 6) Mengkoordinasikan pengiriman daftar kesimpulan hasil pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan.
- 7) Mengkoordinasikan Penerbitan Surat Perintah Pengamatan
- 8) Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penangguhan pajak.
- 9) Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.

f. Seksi Penagihan

- 1) Pencairan tunggakan PPH, PPN, dan PBB.
- 2) Mengadministrasikan surat masuk.
- 3) Melakukan penyiapan surat teguran pajak.
- 4) Melakukan tindakan penagihan aktif.
- 5) Pembenahan/ penataan berkas wajib pajak 100 besar.
- 6) Konfirmasi tunggakan.
- 7) Rekonsiliasi piutang pajak.

g. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
- 2) Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta menyusun monografi pajak.

h. Seksi waskon (Pengawasan dan Konsultan Wajib Pajak)

Seksi waskon memiliki tugas antara lain :

- 1) melakukan pengawasan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
- 2) Pengamatan potensi perpajakan wilayah dan membantu KPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

i. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional ada 2, yaitu kelompok fungsional penilai dan pemeriksa. Adapun tugasnya antara lain :

- 1) Kelompok fungsional penilai : menilai objek pajak milik objek pajak bumi dan bangunan.
- 2) Kelompok fungsional pemeriksa : memeriksa kewajiban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan setelah menerima surat keberatan.

B. Data Khusus

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT PPh

Pada 25 tahun 2010-2012 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah *official assessment* dengan *self assessment system*. *Self assessment system* yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi pengolahan data dan informasi, data jumlah wajib pajak badan dan jumlah SPT Tahunan masuk Pasal 25 tahun 2010-2012 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah wajib pajak badan dan jumlah SPT Tahunan masuk pasal 25 Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah wajib pajak badan	Jumlah SPT tahunan masuk
2010	52742	35087
2011	61471	38463
2012	67019	38018

Tabel 2. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2010-2012

No	Tahun	Jumah Wajib Pajak	Jumah SPT Tahunan Masuk	Presentase	Kriteria
1	2010	52742	35087	66,5%	Cukup
2	2011	61471	38463	62,5%	Kurang
3	2012	67019	38018	56,7%	Kurang

Tabel 3. Skala Lima Normal Absolut

Persentase	Skor Standar
90%-100%	Sangat tinggi
80%-89%	Tinggi
65%-79%	Cukup
55%-64%	Kurang
0%-54%	Rendah

(Sumber : Wayan Nur Kancana dan Sumartana, 1983: 80)

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan

PPh pasal 25 tahun 2010 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah SPT masuk tahun 2010}}{\text{Jumlah Wajib Pajak aktif tahun 2010}} \times 100 \%$$

$$\frac{35087}{52742} \times 100\% = 66,5 \%$$

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan

PPh pasal 25 tahun 2011 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masuk tahun 2011}}{\text{Jumlah Wajib Pajak aktif tahun 2011}} \times 100 \%$$

$$\frac{38463}{61471} \times 100\% = 62.5\%$$

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25 tahun 2012 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masuk tahun 2012}}{\text{Jumlah Wajib Pajak aktif tahun 2012}} \times 100\%$$

$$\frac{38018}{67019} \times 100\% = 56,7\%$$

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
 - a) Kurangnya pengawasan pelaporan SPT PPh Pasal 25 oleh KPP Pratama.
 - b) Keterbatasan akses tentang kebenaran SPT yang disampaikan.
 - c) Wajib Pajak tidak tepat waktu melaporkan SPT.
 - d) Wajib Pajak tidak memberikan data yang sesuai atau benar.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
 - a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menambah sumber daya manusia.
 - b) Kantor pajak Pratama memperbaharui program dalam memvalidasikan data SPT.
 - c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama memberikan batas waktu untuk melaporkan SPT.
 - d) Melakukan penyuluhan pembetulan SPT jika diketahui data yang disampaikan tidak benar.

C. Pembahasan

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25 dari Tahun 2010-2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Adapun perhitungan presentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT tahunan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut ini :

- a. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25 tahun 2010 adalah :

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 untuk tahun 2010 = 66,5 %. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 untuk tahun 2010 bisa masuk dalam kriteria cukup. Angka tersebut masih bisa naik apabila didukung dengan adanya peran serta dari Wajib pajak dan KPP Pratama Yogyakarta. Kesadaran Wajib Pajak dan peran aktif serta pelayanan yang baik dari KPP Pratama Yogyakarta akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga apa yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

- b. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25 tahun 2011 adalah:

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 untuk tahun 2011 = 62,5 %. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 untuk

tahun 2011 turun sebesar 4%. Akan tetapi walaupun mengalami penurunan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk tahun 2011 bisa dikatakan masuk dalam kriteria kurang.

- c. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 25 tahun 2012 adalah:

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 untuk tahun 2012 = 56,7 %. Angka ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan PPh Pasal 25 untuk tahun 2012 turun sebesar 5,8%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam kriteria kurang, karena mengalami penurunan yang sangat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Hambatan yang di hadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25

- a. Kurangnya pengawasan pelaporan SPT PPh Pasal 25 oleh KPP Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tidak bisa mengawasi secara ketat antara Wajib pajak satu dengan yang lain. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tidak bisa mengawasi secara ketat antara wajib Pajak satu dengan lainnya karena jumlahnya yang sangat banyak. Hal tersebut mengakibatkan pengawasan terhadap

Wajib Pajak menjadi tidak maksimal. Pengawasan yang tidak maksimal ini disebabkan oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sulitnya pengawasan terhadap wajib pajak non efektif. Banyaknya Wajib pajak yang sudah tidak mempunyai usaha tetapi belum memberitahukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta bahwa sudah keluar menjadi wajib Pajak.

b. Keterbatasan akses tentang kebenaran SPT yang disampaikan.

Informasi yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta terhadap keadaan Wajib Pajak sangat terbatas sehingga kesulitan untuk menentukan kebenaran SPT yang disampaikan Wajib Pajak.

c. Wajib Pajak tidak tepat waktu melaporkan SPT

Sebagian besar Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam menyampaikan atau melaporkan SPT namun juga tidak sedikit Wajib Pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT dengan alasan yang berbagai macam. Misalnya Wajib Pajak sibuk dalam bekerja sehingga tidak bias meluangkan waktunya, Wajib Pajak tidak memahami tata cara pengisian SPT dan cara pelaporan SPT.

d. Wajib Pajak tidak memberikan data yang sesuai atau benar

Kebenaran atau kesesuaian data yang diberikan oleh Wajib Pajak masih harus diteliti atau ditanyakan kembali oleh pegawai pajak terhadap Wajib Pajak. Tidak sedikit juga Wajib pajak yang memberikan data-data diri yang tidak valid.

3. Upaya-upaya yang di lakukan Kantor pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT PPh Pasal 25

- a. Untuk memaksimalkan pengawasan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menambah sumber daya manusia, seperti anak didik (siswa atau siswi SMK) yang sedang magang atau mencari pengalaman. Memberikan penyuluhan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai tata cara pengumpulan SPT dan siapa saja yang wajib mengumpulkan SPT untuk Wajib Pajak yang belum melaporkan kegiatan usahanya yang sudah tidak beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Dapat juga memakai sistem komputerisasi dalam kantor Pajak Pratama Yogyakarta diperbaharui agar tidak terjadi penyimpangan Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- b. Untuk memudahkan akses data kepada Wajib Pajak Kantor pajak Pratama memperbaharui program dalam memvalidasikan data SPT sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dapat mengetahui perubahan pertambahan nilai Wajib Pajak tersebut. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan penelitian ulang atau menanyakan kembali tentang kebenaran-kebenaran SPT yang disampaikan.

- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama memberikan batas waktu untuk melaporkan SPT, jika batas waktu yang diberikan tetapi Wajib Pajak belum atau tidak melaporkan SPT maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan memberikan sanksi berupa denda yang sudah diatur dalam undang-undang.
- d. Melakukan penyuluhan pembetulan SPT jika diketahui data yang disampaikan tidak benar.

Sebelum melakukan analisa tentang kebenaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama memberikan penyuluhan terhadap Wajib Pajak dan menyelenggarakan penyuluhan di berbagai tempat. Setelah melakukan penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta melakukan analisis tentang kebenaran data yang dilaporkan Wajib pajak. Hal ini dilakukan agar wajib pajak melakukan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang berguna untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak terutama Pajak Penghasilan Pasal 25 badan.

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 66,5 % masuk dalam kriteria cukup, tahun 2011 sebesar 62,5 % masuk dalam kriteria kurang, dan tahun 2012 sebesar 56,7% masuk dalam kriteria kurang. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tiap tahun semakin menurun. Pada tahun 2011 persentasenya menurun sebesar 4 % dari pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 persentasenya menurun sebesar 5,8 % dari tahun 2011.
2. Hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta masih kurangnya pengawasan pelaporan SPT PPh Pasal 25 oleh KPP

Pratama Yogyakarta, keterbatasan akses tentang kebenaran SPT yang disampaikan masih belum dimengerti oleh Wajib Pajak, tidak tepatnya waktu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, sebagian banyak Wajib Pajak masih belum memberikan data yang sesuai atau benar.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memperbaiki atau memperbaharui komputerisasi dalam KPP Pratama Yogyakarta agar tidak terjadi penyimpangan Wajib Pajak dengan KPP Pratama Yogyakarta. KPP Pratama juga memperbaharui program dalam memvalidasikan data SPT sehingga KPP Pratama Yogyakarta dapat mengetahui perubahan pertambahan nilai Wajib Pajak. Upaya agar Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu adalah dengan memberikan batas waktu untuk melaporkan SPT, jika melanggar ketentuan tersebut Wajib Pajak dikenakan denda.

B. Saran

Upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada diperlukan usaha-usaha yang nyata, beberapa usaha yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini antara lain:

1. Petugas pajak hendaknya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyederhanaan prosedur pelaporan pajak.

2. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh para pemeriksa pajak harus diikuti oleh peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak, sehingga akan tercapai kepatuhan Wajib Pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sebaiknya melakukan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan Kantor dapat dilakukan 4 (empat) bulan sekali untuk melakukan audit penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 25, tujuannya untuk mengidentifikasi berkurangnya pajak yang diterima. Sedangkan pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara langsung terjun ke Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, khususnya pajak penghasilan pasal 25, tujuannya untuk mengetahui secara langsung kondisi Wajib Pajak dan mencari tahu alasan Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya, kemudian memberikan solusi dan pengarahan agar Wajib Pajak antusias membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
4. Sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk daerah-daerah yang masih minim pengetahuannya tentang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko dan Renad Kasai. (2008). “Ketentuan Umum Perpajakan” Edisi Revisi. Jakarta
- Iberty, Pandiangan. (2008). “Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia” Erlangga. Surabaya
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Rinaldi Munir. (2009). “Perpajakan”. Jakarta.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. : Alfabeta.
- Supomo.(1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo.(2009) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba Empat.
- Wayan Nur Kencana dan P.P.N Sumartana (1983). *Enalusi Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional.

LAMPIRAN

PERUBAHAN DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

A. NPWP

[illegible]

B. NAMA WAJIB PAJAK

[illegible]

JENIS USAHA
C. /PEKERJAAN

[illegible]

SPESIFIKASI USAHA

[illegible]

KLASIFIKASI
: APANGAN USAHA

--	--	--	--	--	--

(DIISI OLEH PETUGAS)

D. ALAMAT

[illegible]

KELURAHAN/
E. KECAMATAN.

[illegible]

F. KOTA / KODE POS

	<i>I</i>	
--	----------	--

NAMA LENGKAP
WP/KUASA

[illegible]

TANDA TANGAN

LEMBAR UPDATING (DIISI OLEH PETUGAS)

• TANGGAL

TGI		BLN		THN					

- Petugas

[illegible]

NIP

[illegible]

RINGKASAN CATATAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO

TAHUN

(Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan)

N A M A	:
NPWP	:
ALAMAT	:

NO	BULAN	Jumlah Peredaran / Penerimaan Bruto	Keterangan
1	JANUARI	Rp.	
2	FEBRUARI	Rp.	
3	MARET	Rp.	
4	APRIL	Rp.	
5	MEI	Rp.	
6	JUNI	Rp.	
7	JULI	Rp.	
8	AGUSTUS	Rp.	
9	SEPTEMBER	Rp.	
10	OKTOBER	Rp.	
11	NOVEMBER	Rp.	
12	DESEMBER	Rp.	
JUMLAH		Rp.	

CATATAN :
Harap Dilampirkan pada
SPT PPh Tahun

.....
Wajib Pajak yang bersangkutan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan penggunaan Kepada Yth :
Norma Penghitungan Kepala KPP Pratama Yogyakarta
Jl. P. Senopati No. 20
Di-
YOGYAKARTA

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 telah diubah dengan Nomor 36 Tahun 2008 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami :

Nama :
Alamat :
N P W P :


memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode Nomor :

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

()

Lembar I untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II untuk : Wajib Pajak

	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
		Tahun Kalender 20___		Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) ___ / 20___		

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	___	___	___	___	___	___	___	___	___	___	
2	Nama WP											
3	Alamat											
4	Nomor Telepon						5	Alamat Email				

Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Tahun Kalender ___	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian 3 Angka 2 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun ___	

Catatan

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

Bagian D – Lampiran

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak _____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/> i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi oleh Petugas	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima:	
Nama: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Langsung dari WP	
NPWP: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).



Kementerian
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - I

Tahun Kalender

2 0

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)			
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP orang			
C.	Jumlah (A1 + B)			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Kementerian
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

1721 - II

MASA PAJAK

(Bulan/Tahun)

/ 2 0

A. Pegawai Tetap yang Keluar

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. Pegawai Tetap yang Masuk

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Kementerian
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA PENSIUN
BERKALA

1721 - T

MASA PAJAK
(Bulan/Tahun)

/ 2 0

No	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB) (4)	Jumlah Tanggungan (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan.

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2009
Tanggal: 25 Mei 2009

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NOMOR

N P W P

: - - - - - (1)

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
Jumlah					
Terbilang :					

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pembetulan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak (2)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL)

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

/ 2 0

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Jumlah						

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)

NOMOR :

NPWP :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.			
JUMLAH				
Terbilang :				

*) Lihat petunjuk pengisian

....., 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :


Nama :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/>

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	<input type="text"/>
2. Nama :	<input type="text"/>
3. Alamat :	<input type="text"/>

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBJ/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH			
T. bilangan :			

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). 2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). 3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). 4. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai). 6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur). 7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang). 8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Dijisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <input type="text"/> NPWP <input type="text"/>		Tanggal <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> tanggal bulan tahun	
Tanda Tangan & Cap Tanggal <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> tanggal bulan tahun		Tanda Tangan	



KEMENTERIAN
KEUANGAN RI
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Masa Pajak

/

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh PASAL 23						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst						
JUMLAH						
B. PPh PASAL 23						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst						
JUMLAH						

☐

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

☐

KUASA WAJIB PAJAK

Nama

NPWP

Tanggal

tanggal bulan tahun

Tanda tangan & Cap



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor: (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1)		<input type="text"/>	2%	
	2)		<input type="text"/>	2%	
	3)		<input type="text"/>	2%	
	4)		<input type="text"/>	2%	
	5)		<input type="text"/>	2%	
	6)		<input type="text"/>	2%	
	****)				
JUMLAH					
Terbilang :					

20 (4)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

(6)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26

Nomor

NPWP

Nama

Alamat

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
JUMLAH					

Terbilang :

20

Pemotong Pajak

NPWP

Nama

Tanda Tangan, Nama dan Cap